

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ariesto, H. S., dan Adrianus, Arief, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, Prenada Media, Jakarta.
- Balfas, H. M., 2012, *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)*, Tatanusa, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya, Bandung.
- Harahap, M.Y, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hay, M. A., 1984, *Hukum Perdata Material (Jilid II)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- James, J. I., 2014, *Surat Berharga : Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Joni, Emirzon, 2002, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nasarudin, M.I., 2006, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Natadimaja, Harumiati, 2009, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nugroho S.A, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Sanjaya, U.H, 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, NFP Publishing, Yogyakarta
- Sastrawidjaja, M. S., 2010, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Sitorus, Tarmiden, 2015, *Pasar Obligasi Indonesia Teori dan Praktik*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, R. H., 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Viktor, M.S, dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wijaya, Andika dan Ananta, Wida, 2018, *IPO Right Issue dan Penawaran Umum Obligasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Hasil Penelitian atau Tugas Akhir**

Eka Esti Susanti, 2010, *Structured Creditors dalam Kepailitan (Studi Perbandingan Hukum Kepailitan Indonesia dan Belanda)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Shinta Devi, 2014 , “Pertanggung Jawaban Yuridis Wali Amanat Dalam Penerbitan Obligasi Dalam Hal Emiten Melakukan Wanprestasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal “, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Teng Berlianty, 1999 , “Peran dan Tanggung Jawab Wali Amanat Sebagai Salah Satu Lembaga Penunjang Pasar Modal Dalam Penerbitan Obligasi”, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

### **Internet**

Chowdhry, Bhagwam, dan Goyal, Amit, “Understanding The Financial Crisis in Asia”, <http://www.elsevier.com/locate/econbase>, diakses 20 April 2008 yang dikutip oleh Tata Wijayanta.

Indonesia Stock Exchange, “Surat Utang Obligasi”, <https://www.idx.co.id/produk/surat-utang-obligasi/>, diakses 7 Maret 2019

Letezia Tobing, “Perbedaan Antara Kepailitan dan PKPU”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c3529a6061f/hukum-dagang>, diakses 23 Mei 2019

Nien Rafles Siregar, “Perbedaan Antara Kreditor Separatis dengan Kreditor Konkuren”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1998/apa->

*yang-dimaksud-dengan-kreditor-separatis-dan-kreditor-konkuren-dalam-kepailitan*, diakses 31 Mei 2019.

Tiga Pilar Sejahtera Food, about us , <https://tpsfood.id/our-company-en/about-us/>, diakses 12 Mei 2019.

UpCounsel, Legal Definition of Silence , <https://www.lectlaw.com/def2/s156.htm>, diakses 27 Juni 2019.

### **Makalah atau Pidato**

Elijana, 1998, “*Pengadilan Niaga dan Dampaknya*”, Pidato, Seminar Perppu Kepailitan dan Penerapannya dalam Praktek di Indonesia, Jakarta.

### **Jurnal**

Hornuf, Lars, “Covenants in European investment-grade corporate bonds”, *Capital Markets Law Journal*, Vol. 10, No. 3, May 2015.

Hill, Simon, “The credit crisis: have trustees lived up to expectations?”, *Capital Markets Law Journal*, Vol. 5, No. 1, December 2009.

Robert F. Dittmar, “Do Sovereign Bonds Benefit Corporate Bonds in Emerging Markets?”, *Capital Markets Law Journal*, Vol. 21, Issue 5, March 2008.

Yudi Kornelis, “Harmonisasi Hukum Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan Perpektif Budaya Hukum Indonesia”, *Jurnal Selat*, Vol. 4, Nomor 1, Oktober 2016.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2017 Tentang Wali Amanat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6076)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5758)

.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963 Tentang Pinjaman Obligasi Oleh Bank/Perusahaan/Badan Pemerintah Maupun Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2526)

Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617)

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1455K/Pdt/2017

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 817 K/ Pdt.Sus-Pailit/2015